

ABSTRAK

Pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam melakukan pendaftaran perizinan usaha dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Persoalannya, adanya peraturan perundang-undangan baru ternyata tidak serta merta diikuti dengan meningkatnya jumlah perizinan yang masuk. Berkaitan dengan itu, perlu diteliti tentang bagaimana proses perizinan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) berbasis risiko di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, apa saja faktor yang menjadi penghambat serta bagaimana upaya Pemkab Pamekasan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris karena merupakan penelitian hukum dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan mengenai penerapan peraturan di dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan fakta dan data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perizinan bagi pelaku usaha Mikro, kecil, dan menengah berbasis risiko di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai berikut : Pertama, pelaku usaha mendaftar melalui situs web OSS-RBA supaya mendapatkan akses dengan membuat nama pengguna dan kata sandi; Kedua, harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan memiliki surel aktif untuk membuat akun di platform OSS-RBA. Langkah berikutnya adalah memasukkan bidang usaha dan nilai investasi. Setelah semua data dilengkapi, sistem akan mengeluarkan NIB. Permasalahan yang menghambat proses perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah rendahnya pemahaman mengenai tahapan perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) dan masih gagap teknologi dalam mengajukan perizinan secara online. Upaya Pemkab Pamekasan dalam mengatasi permasalahan yang menghambat pengajuan perizinan bagi Usaha mikro dan kecil adalah bekerjasama dengan kecamatan untuk memberikan ruang/tempat klinik perizinan yang ditempatkan di seluruh Kecamatan yang diisi oleh beberapa pegawai DPMPTSP sebagai tim pelaksana/operator agar masyarakat dapat mengurus maupun memperpanjang izin usahanya tanpa harus datang ke kantor DMPTSP yang ada di Kabupaten.

Kata Kunci : perizinan, berbasis risiko, usaha mikro kecil dan menengah

ABSTRACT

The government provides convenience for MSME actors in registering business licenses with the aim to provide certainty and protection for micro and small business actors. The problem is, the existence of new laws and regulations is not necessarily followed by an increase in the number of incoming permits. Related to that, it needs to be researched about how the licensing process for micro, small, medium enterprises (MSMEs) based on risk in The District of Prohibition of Pamekasan Regency after the enactment of Law No. 11 of 2020 on Work Copyright, what are the factors that become obstacles and how the efforts of the Pamekasan Government in overcoming these obstacles.

his research is empirical legal research because it is legal research by looking at and observing what is happening in the field regarding the application of regulations in society using the approach of facts and data obtained and then conducted qualitative juridical analysis.

The results showed that the licensing process for micro, small, and medium enterprises based on risk in The District of Prohibition of Pamekasan Regency after the enactment of Law No. 11 of 2020 on Work Copyright as follows: First, business people register through the OSS-RBA website in order to gain access by creating a username and password; Second, it must have a Population Master Number (NIK), and have an active email to create an account on the OSS-RBA platform. The next step is to include the field of business and the value of the investment. Once all the data is completed, the system will issue a NIB. Problems that hinder the licensing process for micro-businesses and Small after the enactment of Law No. 11 of 2020 on Copyright Work is the low understanding of the stages of risk-based licensing (OSS-RBA) and the stuttering of technology in applying for permits online. The efforts of the Pamekasan Government to overcome the problems that hinder the application of permits for micro and small businesses are to cooperate with the sub-district to provide the space / place of licensing clinics placed throughout the District filled by several DPMPTSP employees as the implementing team / operator so that the community can take care or extend their business license without having to come to the DMPTSP office in the District.

Keywords: licensing, risk-based, small and medium-sized micro enterprises.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Lokasi Penelitian	11
1.6.3 Metode Pendekatan	11
1.6.4 Pengumpulan Data	12
1.6.5 Analisa Data	13

BAB II TINJAUAN UMUM PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

2.1 Izin Usaha	16
2.1.1 Pengertian Izin usaha	16
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Izin Usaha.....	16
2.1.3 Materi yang Terdapat Pada Perizinan.....	19
2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	22
2.2.1 Definisi UMKM	22
2.2.2 Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	26
2.2.3 Aspek Yuridis Perizinan UMKM	27

BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN UMK-M BERBASIS RISIKO DI KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

3.1 Pelaksanaan Perizinan UMK-M Berbasis Risiko di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.....	31
3.2 Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Perizinan di Kecamatan Larangan Kabupaten Larangan.....	52

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA.....	65
----------------------------	-----------

BIODATA PENULIS.....	68
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 – Penentuan Izin Usaha Berdasarkan Tingkat Resiko	38
Gambar 2 – Alur Perizinan Sistem OSS-RBA	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.1 Jumlah Izin Usaha di Kabupaten Pamekasan	33
Tabel 3.1 Perbandingan Pelaksanaan Perizinan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU Cipta Kerja	40